

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164.
<https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (B. S. Sartika (ed.); Cetakan Pe). UMSIDA Press.
- Bustam, M. (2018). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)*.
- Daerah, U. undang tentang P. (2014). *Undang-undang tentang Pemerintah Daerah (UU No 23 Tahun 2014)* (Vol. 1, Issue hal 140, p. 43).
<http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311>
- Elkha, F., & Wahidawati. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–19.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
<https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*. (Cetakan ke). BP Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (A. Pramono (ed.)). Poliban PRESS.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Hidayat, D., Sari, M., & AR, F. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Valuta*, 7(1), 1–13.

- Hutapea, D. H. (2017). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi:Desa Di Kecamatan Sunggul Kabupaten Delidrt dang)*.
- Kadang, S. B., Laloma, A., & Tampongangoy, D. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103), 3.
- Launtu, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 18(1), 14–27. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1318>
- Lubis, S. M. Y. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal). *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Menteri, P. (2015). *Peraturan Menteri tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Permen Nomor 21 tahun 2015 Tahun 2016)* (pp. 1–38).
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162. <https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26>
- Nawang Sari, H. C. P. (2021). Apakah Website Desa Sudah Memuat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa? *Jurnal Investasi*, 7(2), 13–21. <https://investasi.unwir.ac.id/index.php/investasi/article/view/132/77>
- Negeri, P. P. D. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Permendagri Nomor 37 Tahun 2007)*.
- Pemerintah, P. (2010). *Peraturan Pemerintah tentang Penyajian Laporan Keuangan (PP No 71 Tahun 2010)* (Vol. 9, Issue 1, pp. 76–99).
- Pemerintah, P. (2014). *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014 (PP No 43 Tahun 2014 pasal 1)*. 1(hal 140), 43. <http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa (Permendagri No 114 Tahun 2014)*. 1–34.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2014b). *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendragi No 113 Tahun 2014)*. In

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Vol. 72, Issue 10, pp. 1–13).
<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>

- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No 20 Tahun 2018)*.
- Peraturan Pemerintah. (2014). *Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa (PP No 60 Tahun 2014)* (pp. 1–8).
- Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pemaknaan masyarakat desa secara kualitatif. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2020), 122–127.
<https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13665>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Umami, & Nurodin, I. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Punagaya Kecamatan Bangala Kabupaten Jonoponto. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.
- Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28(1), 35–50. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376>
- Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb, XII(11)*, 118–126.
- Yomersianus Seran, F., Bahri, S., & Prasetyaning Pawestri, H. (2021). Analisa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Pada Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur. <Http://Publishing-Widyagama.Ac.Id/Ejournal-v2/Index.Php/WNCEB, Wnceb>, 1–11. <https://ntt.bpk.go.id/kabupaten-malaka>